

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Audit Operasional

1. Pengertian Audit Operasional

Audit adalah proses pengumpulan data dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompetent dan independent untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing dilakukan oleh seseorang yang independent dan kompetent.¹

Audit juga diartikan sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti dan informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.²

Audit operasional adalah pengkajian (review) atas setiap bagian dan prosedur dan metoda yang ditetapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas. Hasil akhir dari suatu audit operasional biasanya berupa rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi.³

¹Firdaus, *Auditing*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h.1.

²Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, *Auditing dan Jasa Assurance*, (Jakarta: Erlangga, 2008),h. 4.

³M.Haryono. Josep, *Auditing*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2001), h.16.

Audit operasional adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.⁴

Audit operasional juga diartikan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasional tersebut adalah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efesiensi, efektifitas, dan keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya: fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi produksi, fungsi pergudangan dan distribusi, fungsi personalia (sumber daya manusia), fungsi akuntansi dan keuangan.⁵

Audit operasional sangat identik dengan audit manajemen. Karena dari definisi keduanya tampak jelas bahwa audit operasional maupun audit manajemen mempunyai definisi dan tujuan yang sama, hanya saja dalam bukunya IBK Bayangkara menggunakan istilah audit manajemen untuk menghindari terjadinya penyempitan makna operasional yang identik dengan produksi, karena saat ini berkembang paradigma baru tentang manajemen produksi menjadi manajemen operasional. Sedangkan makna operasional dalam audit operasional memiliki

⁴Firdaus, *Auditing...*, h.263.

⁵Sukrisno. Agoes, *Auditing*, (Jakarta:Salemba Empat, 2012),h. 11.

cakupan pengertian yang lebih luas yaitu setiap program/aktivitas dan/atau entitas yang bisa diaudit.

Jadi audit operasional adalah pengevaluasian terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Dalam konteksnya audit operasional meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Audit operasional dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktifitas, program-program yang diselenggarakan, atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.⁶

2. Tujuan Audit Operasional

Tujuan dari audit operasional adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen⁷

Namun tujuan audit operasional juga disebutkan untuk menilai kinerja (performance) dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan, untuk menilai apakah berbagai sumber daya (manusia, mesin, dana, harta lainnya) yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis, untuk menilai

⁶IBK Bayangkara, *Audit Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008),h. 3.

⁷Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h.165.

efektifitas perusahaan dalam mencapai tujuan (objective) yang telah ditetapkan oleh top management, untuk memberikan rekomendasi kepada top management agar dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerpan struktur operasional perusahaan agar dapat meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan efektivitas perusahaan.⁸

Namun dari kedua penjelasan mengenai tujuan audit operasional tersebut kedua nya sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan efisiensi, keekonomisan dan efektivitas perusahaan.

3. Unsur – unsur dan Langkah – langkah Audit Operasional

Unsur pokok dari audit operasional adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.⁹

Langkah-langkah dalam pengendalian audit operasional yang harus dilakukan oleh auditor adalah sebagai berikut:

⁸Firdaus, *Auditing...*, h.263.

⁹Mulyadi, *Sistem Akuntansi...*,h.164.

1. Audit Pendahuluan

Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan dalam usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Beberapa hal penting untuk yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini, antara lain:

- a. Pemahaman auditor terhadap objek audit, dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapat informasi tentang sumber daya (kapasitas aktivitas) yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Di samping itu, metode operasi (cara pelaksanaan kegiatan) juga harus menjadi perhatian penting karena dari hubungan antara metode operasi dengan ketersediaan sumber daya, auditor akan mendapatkan informasi awal apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman.

Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis, dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal berikut informasi yang mendukung tujuan audit, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, informasi yang mengarah pada tujuan audit.

- b. Penentuan tujuan audit, auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit operasional yang dilakukan, dalam rangka menyajikan

kerangka kerja audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkup yang luas. Terhadap hal ini auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya untuk merumuskan tujuan audit yang lebih rinci. Beberapa alasan yang mendasari dilakukannya audit operasional diantaranya :

1. Terjadinya keborosan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan.
 2. Tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai.
 3. Adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
 4. Terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya.
 5. Adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan.
 6. Sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik.
- c. Penentuan ruang lingkup dan tujuan audit, ruang lingkup audit menunjukkan luas (area) dari tujuan audit. Secara garis besar ruang lingkup audit operasional terdiri atas:

1. Bidang keuangan

Ruang lingkup keuangan ini mencakup:

- a. Pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan.
- b. Pertanggungjawaban audit dari kegiatan yang dilakukan.
- c. Penyelenggaraan catatan akuntansi.
- d. Laporan keuangan.
- e. Pemanfaatan sistem akuntansi yang dimiliki perusahaan.

2. Ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan

Ruang lingkup peraturan dan kebijakan perusahaan mencakup:

- a. Kesesuaian pelaksanaan program dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut.
- b. Kesesuaian penerimaan dan penggunaan dana dengan peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan program tersebut.

3. Ekonomisasi

Ruang lingkup ekonomisasi menekankan pada bagaimana setiap aktivitas/kegiatan dalam objek audit mengelola dana yang dimiliki objek audit dalam memperoleh hasil yang lebih besar, termasuk pencapaian alternatif pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dengan biaya yang lebih rendah.

4. Efisiensi

Efisiensi menyangkut optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada bagian ini auditor menekankan bagaimana seharusnya proses berjalan sehingga tercapai tujuan dengan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimilikinya.

5. Efektivitas

Pada ruang lingkup ini, auditor menekankan perhatiannya pada pencapaian tujuan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, pemanfaatan hasil program, pengaruh pemanfaatan hasil program atau kegiatan terhadap pencapaian perusahaan secara keseluruhan.

- d. Review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit.

Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memotivasi karyawan untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya berbagai penyimpangan dan pencapaian tujuan perusahaan. Suatu sistem pengendalian operasional harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian operasional yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pernyataan tujuan perusahaan.
 2. Rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan.
 3. Kualitas dan kuantitas SDM yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dengan adanya pemisahan fungsi yang memadai.
 4. Sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi.
 5. Sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik.
- e. Pengembangan kriteria awal dalam audit

Dalam pengembangan kriteria ini, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber, yaitu undang-undang (peraturan) yang berlaku, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit, norma (standar) yang sudah mendapat pengakuan (diterima) secara umum, kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis, pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya.

2. Kesimpulan Hasil Audit Pendahuluan

Dari hasil audit pendahuluan, auditor harus membuat kesimpulan atas hasil audit pendahuluanyang telah dilakukan. Kesimpulan ini akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil

dalam tahapan audit selanjutnya. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Daftar bidang/kegiatan yang mengandung kelemahan, yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya
 2. Alasan mengapa bidang/kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan
 3. Temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang/kegiatan yang masih mengandung kelemahan
 4. Rekomendasi sementara yang diajukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada
 5. Tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya
 6. Bukti-bukti yang perlu diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan
3. Review Terhadap Pengendalian Operasional

Suatu sistem pengendalian operasional harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian operasional yang baik mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan tujuan perusahaan

Tujuan perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami.

Pernyataan tujuan dapat memberikan arah kepada semua komponen dalam melaksanakan aktivitasnya karena dengan pernyataan tujuan ini, didukung dengan sosialisasi yang memadai akan membantu setiap komponen di dalam perusahaan tidak saja mampu untuk melaksanakan berbagai aktivitas tetapi juga memahami untuk apa mereka melakukan aktivitas tersebut, apa manfaatnya bagi perusahaan dan bagaimana seharusnya melaksanakan aktivitas tersebut sehingga secara optimal dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam melakukan penelaahan terhadap sistem operasional perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan.

2. Rencana perusahaan

Rencana yang merupakan penjabaran dari tujuan perusahaan, harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan strategi untuk mengimplementasikannya. Dalam rangka mencapai sasaran perusahaan, rencana diimplementasikan dalam bentuk berbagai program/aktivitas lengkap dengan anggaran untuk setiap program/aktivitas tersebut.

Rencana biasanya disusun berdasarkan pencapaian terbaik perusahaan pada waktu sebelumnya untuk menentukan pencapaian terbaik berikutnya. Oleh sebab itu, penyusunan rencana harus diawali dengan adanya identifikasi terhadap ketersediaan sumber daya, berbagai

hambatan internal, peluang-peluang yang mungkin (ingin) dicapai, dan berbagai hambatan eksternal yang mungkin dihadapi. Yang tidak kalah pentingnya, di samping realistis rencana juga harus memuat tentang keinginan perbaikan secara terus-menerus (*continous improvement*) harus dilakukan

3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai

Perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan harus didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Untuk menilai ketersediaan SDM yang efektivitasnya dalam mendukung pencapaian perusahaan, auditor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah rekrutmen karyawan yang dilakukan telah melalui suatu perencanaan SDM ?
- b. Apakah seleksi karyawan yang dilakukan telah sesuai dengan pedoman penerimaan karyawan yang ditetapkan perusahaan ?
- c. Apakah karyawan yang diterima telah sesuai dengan klasifikasi bidang kerja (jabatan) yang akan diisi dan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada pada perusahaan ?
- d. Apakah spesifikasi dan deskripsi tersedia untuk masing-masing jabatan yang ada dalam perusahaan ?

- e. Apakah keputusan penempatan karyawan telah melalui orientasi yang memadai dan sesuai dengan kecenderungan berprestasi karyawan tersebut ?
 - f. Apakah setiap pekerjaan telah dilengkapi dengan uraian kerja yang memadai ?
 - g. Apakah program peningkatan kemampuan karyawan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien ?
 - h. Apakah penilaian prestasi, pemberian sanksi, atau penghargaan kepada karyawan telah dilakukan secara adil, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut ?
4. Kebijakan dan praktik sehat

Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan harus memerhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dalam menguji kebijakan yang dibuat oleh perusahaan, auditor harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Apakah kebijakan dinyatakan jelas dalam bentuk tertulis dan sistematis serta dikomunikasikan kepada seluruh manajemen dan karyawan secara tepat waktu
- 2. Apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

3. Apakah kebijakan yang dibuat telah mengkomodasi kepentingan berbagai pihak dan mengatur tentang hak kewajiban semua pihak
 4. Apakah kebijakan telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan efektif
 5. Apakah ada kebijakan khusus bagi setiap manajemen/operasional lain yang relevan dengan pelaksanaan setiap kegiatan termasuk sanksi-sanksi terhadap pelanggaran berdasarkan peraturan yang berlaku
5. Sistem review yang efektif

Sistem *review* menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan *review* terhadap berbagai aktivitas/kegiatan yang dilakukan. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Efektivitas sistem pelaporan operasional perusahaan dapat dinilai dari hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah sistem pelaporan yang dimiliki dapat memberikan informasi mutakhir yang dibutuhkan oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab
2. Apakah ada keharusan dari setiap pelaksanaan untuk melaporkan secara tertulis setiap hasil kerja/aktivitas yang dilakukan ?

3. Apakah laporan disusun berdasarkan data dan informasi yang benar dan tepat waktu ?

Ada tujuh langkah kunci yang harus diperhatikan auditor dalam melakukan *review* dan pengujian terhadap pengendalian operasional perusahaan, yaitu:

1. Menetapkan tingkat penting (*significance*) dan pekannya (*sensitivity*) hal-hal pokok dari program/aktivitas yang diaudit
2. Menilai tingkat kerentanan program/aktivitas tersebut terhadap penyalahgunaan sumber daya, kegagalan pencapaian sasaran dan ketidaktaatan terhadap ketentuan, peraturan dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan
3. Mengidentifikasi dan memahami pengendalian-pengendalian operasional yang relevan
4. Menetapkan apa yang sudah diketahui tentang efektivitas pengendalian
5. Menilai kecukupan desain pengendalian
6. Menetapkan melalui pengujian apakah pengendalian-pengendalian yang ada sudah cukup efektif, melaporkan hasil-hasil penilaian operasional dan mendiskusikan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan

4. Audit Lanjutan

Audit ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian operasional. Pada tahap ini auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi:

1. Mengumpulkan tambahan informasi
2. Memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten
3. Membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat
4. Menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasikannya.
5. Pelaporan

Bagian akhir dari proses audit operasional adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit operasional, yaitu:

- a. Cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit
- b. Cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitikberatkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini.

5. Tindak Lanjut

Implementasi tindak lanjut atas informasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen dari perusahaan untuk meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atau beberapa kelemahan/kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atau rencana, pelaksanaan, atau pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan.¹⁰

4. Keterbatasan Audit Operasional

Ada beberapa keterbatasan dari audit operasional yaitu:

1. Waktu

Waktu menjadi faktor yang sangat membatasi, karena auditor harus memberikan informasi kepada manajemen secara cepat atau setidaknya tepat waktu untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Sebaiknya audit operasional dilakukan secara teratur untuk menjamin bahwa permasalahan yang penting tidak menjadi kronis dalam perusahaan.

¹⁰IBK Bayangkara, *Audit Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 21.

2. Keahlian auditor

Kurangnya pengetahuan banyak dikeluhkan oleh auditor operasional karena tidak mungkin bagi seorang auditor mengetahui dan menguasai berbagai disiplin bisnis. Auditor operasional hanya lebih ahli dalam bidang audit daripada dalam bidang bisnis.

3. Biaya

Biaya juga merupakan faktor pembatas, karena itu tentu saja biaya audit harus lebih kecil dari biaya yang harus dihemat. Oleh karena itu, auditor harus harus mengabaikan masalah kecil yang mungkin dapat menekan biaya jika diselidiki lebih lanjut.¹¹

5. Audit Operasional dalam Perspektif Islam

Dalam islam audit dikenal juga dengan kata *muhasabah* yang mana kata muhasabah tersebut memiliki arti yaitu introspeksi.¹² Konsep muhasabah dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 18-19

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَكُمْ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسُهُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْفٰسِقُوْنَ ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok (hari

¹¹Nugroho Widjayanto, *Pemeriksaan Operasional Perusahaan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 1985), h.23.

¹²Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: PP Al-Munawir, 1984), h.283.

*akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Megetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka inilah orang-orang yang fasik.*¹³

Audit dalam Islam sudah lama hadir dan menjadi bahan kajian intelektual baik muslim maupun non muslim. Dari sudut tata cara Islam sebenarnya tuntutan ini sangat dianjurkan. Dalam Al-qur'an sudah dijelaskan bagaimana seorang harus mengecek kebenaran (*tabayyun*) jika ada informasi yang diterima, jadi jangan ditelan mentah-mentah apalagi informasi yang menyangkut kepentingan yang luas. Bukan itu saja, Islam juga menganjurkan mempromosikan kebenaran dan keadilan. Fungsi audit yang dilakukan akuntan independen sebenarnya tidak menyalahi bahkan sangat sesuai dengan sistem nilai Islam yang menginginkan informasi yang benar yang tidak merugikan (*menzalimi*) siapapun.¹⁴

Audit operasional sendiri adalah bagian dari auditing maka dari itu audit operasionalpun sama halnya dengan auditing sangat dianjurkan dalam Islam. Selain dikenal dengan kata *muhasabah* dalam Islam audit juga dapat diartikan dengan *tabayyun*.

Tabayyun adalah mencari kejelasan hakekat suatu atau kebenaran suatu fakta dengan tekuti, seksama dan hati-hati. Perintah untuk *tabayyun* adalah perintah yang sangat penting, terutama pada akhir-akhir ini di mana kehidupan antar sesama umat sering dihindangi prasangka. Allah memerintahkan kita untuk

¹³Departemen Agama RI, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h.548.

¹⁴Sofyan. S Harahap, *Auditing dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002), h. 87.

bersikap hati-hati dan mengharuskan untuk mencari bukti yang terkait dengan isu mengenai tuduhan atau yang menyangkut identifikasi seseorang. *Tabayyun* yang berhasil adalah apabila mampu mengungkapkan fakta yang dijamin akurasinya, dan analisi yang jernih. Kejernihan berfikir dalam suatu fakta akan membangun kearifan dalam bertindak. Termasuk kearifan dalam berdakwah. Kebenaran informasi yang dihasilkan melalui proses yang objektif, diharapkan juga dapat membangun sikap toleran terhadap orang lain, yang sama-sama menjunjung tinggi objektivitas.¹⁵

Dari pengertian *tabayyun* diatas maka dapat disimpulkan bahwa Islam sangat mengajurkan audit, karena audit sendiri adalah proses pegevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas yang dilakukan seseorang.¹⁶ Sama halnya dengan audit maka audit operasional pun sangat dianjurkan dalam Islam karena dengan melakukan audit operasinal maka sama halnya dengan mengkaji (review) atas setiap bagian dan prosedur dan metoda yang ditetapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efesiensi dan efektifitas.¹⁷

¹⁵“Pentingnya Tabayyun” <https://marzanianwar.wordpress.com/>, diunduh pada 09 sept. 2015 pukul 15.00 WIB.

¹⁶Firdaus, *Auditing...*, h.1.

¹⁷M.Haryono Josep, *Auditing...*, h.16.

B. Piutang Usaha

1. Pengertian Piutang Usaha

Piutang adalah tagihan baik kepada individu-individu maupun kepada perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Pada umumnya, piutang diklasifikasikan menjadi piutang usaha (dagang), piutang wesel, dan piutang lain-lain. Piutang usaha (dagang) sendiri adalah tagihan kepada pelanggan yang sifatnya terbuka. Piutang usaha berasal dari penjualan barang dagangan dan jasa secara kredit dalam operasi usaha normal. Piutang usaha sering juga disebut piutang dagang.¹⁸

Piutang timbul apabila perusahaan (atau seseorang) menjual barang atau jasa kepada perusahaan lain (atau orang lain) secara kredit. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya transaksi penjualan. Pada umumnya piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit.¹⁹

2. Permasalahan Manajemen Piutang

Pos piutang dalam neraca timbul karena adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Semakin longgar persyaratan kredit yang diberikan, akan semakin besar pula jumlah penjualan. Sebaliknya, semakin ketat persyaratan yang diberlakukan, maka kemungkinan pelanggan akan beralih ke pada pesaing

¹⁸Slamet. Sugiri, *Akuntansi Pengantar 2*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005), h.43.

¹⁹Al. Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akuntansi*, (Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2003), h.52.

sehingga penjualan menjadi berkurang. Dengan demikian, investasi dana dalam bentuk piutang menyangkut pertimbangan timbal balik (*trade-off*) antara profitabilitas dengan risiko.²⁰

Pada dasarnya manajemen piutang meliputi permasalahan:

1. Menentukan tingkat piutang dagang terdiri dari :
 - a. Volume penjualan kredit
 - b. Rata-rata periode antara penjualan dan penagihan tergantung pada :
 - 1) Kondisi ekonomi
 - 2) Variabel kebijakan kredit, faktor yang dikendalikan yaitu standar kredit, periode kredit, diskon untuk pembayaran lebih cepat, kebijakan penagihan
2. Standar Kredit
 - a. Kebijakan kredit optimal berkaitan dengan biaya marjinal kredit dari pertambahan keuntungan dan peningkatan penjualan.
 - 1) Biaya marjinal meliputi biaya produksi dan penjualan.
 - 2) Biaya marjinal berkaitan dengan kualitas kredit terdiri dari biaya kerugian piutang tak tertagih, biaya pemrosesan dan penagihan, biaya modal dan piutang dagang
 - b. Evaluasi risiko kredit, misalnya 5 C :
 - 1) *Character*, kemungkinan pelanggan mempunyai kemauan untuk memenuhi kewajiban

²⁰Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), h.133.

- 2) *Capacity*, pertimbangan atas evaluasi dan kemampuan membayar pelanggan
- 3) *Capital*, mengukur posisi keuangan secara umum dari perusahaan seperti ditunjukkan oleh rasio keuangan
- 4) *Collateral*, ditunjukkan oleh asset pelanggan yang digunakan sebagai jaminan
- 5) *Condition*, dampak umum terhadap perusahaan atau perkembangan khusus dibidang ekonomi.²¹

3. Utang dan Piutang dalam Pandangan Islam

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya berhutang dua ribu rupiah akan dibayar dua rupiah. Utang piutang dalam islam dikenal dengan nama *qardh*, dalam arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diatrikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).

Dalam pengertian istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai berikut.

²¹Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Modal Kerja*, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1995), h.66.

أَقْرَضُ هُوَمَا تُعْطِيهِ مَنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ
مَخْصُوصٌ يَلْزَمُ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخَرَ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ

Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Sayid sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai berikut.

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيُرَدَّ مِثْلَهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.²²

Menurut Imam Syafi'i utang piutang (*qardh*) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.²³

Dasar hukum disyariatkannya *qardh* terdapat pada Al-Quran surat Al hadid

(57) ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.²⁴

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h.273.

²³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.131.

²⁴Departemen Agama RI, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), h.538.

Surat At-Taghabun (64) ayat 17 :

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

*Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakan balasan kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.*²⁵

Terdapat rukun dan syarat dalam melakukan utang piutang (*qardh*), yaitu :

1. 'aqid, yauti *muqridh* (pemberi utang) dan *muqtaridh* (penerima utang), untuk 'aqid maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*'. Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.
2. *Ma'qudh 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atau Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan akad *qardh*.

²⁵Departemen Agama RI., h.557.

3. *Shigat* (ijab dan kabul)

Qardh adalah salah satu akad kepemilikan harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Contohnya: “*saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberi dengan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. Penggunaan lafal *salaf* untuk *qardh* didasarkan kepada hadis Abu Rafi’:

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : اسْتَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكُرٍّ فَجَاءَتْهُ
إِبِلُ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي الرَّجُلَ بِكُرِّهِ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا حِيَارًا
رُبَاعِيًّا فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

Dari Abu Rafi’ ia berkata: “Nabi berutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: “Saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh. Nabi kemudian bersabda : ‘Berikan saja kepada unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.’” (HR. Jamaa’ah kecuali Al-Bukhari).²⁶

Hukum utang piutang dalam Islam dapat menjadi wajib apabila utang diberikan kepada orang yang mengajukan pinjamannya itu dalam keadaan terpaksa yang sangat membutuhkan dan terlantar. Seperti memberikan uang kepada orang yang kelaparan dan butuh makan. Jika tidak diberikan pinjaman

²⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*,h.278.

akan memberikan kemudharatan, misalnya saja dia akan sakit parah dan mungkin meninggal dunia.

Utang piutang juga bisa menjadi haram apabila memberikikan utang kepada orang yang memohon pertolongan dengan pinjaman tersebut untuk maksiat. Dan menjadi sunnah apabila memberikan utang itu kepada orang yang mengajukan tidak dalam keadaan terpaksa, misalnya seseorang mengajukan pinjaman bukan untuk hal-hal yang darurat. Pada hakekatnya seseorang walau pun tidak mengajukan pinjaman saat itu, tidak akan mengakibatkan hal buruk yang akan terpidananya. Hanya saja jika tidak meminjam dia tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk yang akan datang, misalnya meminjam untuk modal usaha.²⁷

4. Faktor yang Mempengaruhi Piutang Usaha

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi piutang usaha, yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan penjualan kredit. Semakin longgar kebijakannya, akan semakin besar pula jumlah piutang.
2. Syarat pembayaran penjualan kredit. Semakin longgar syarat pembayaran yang diberlakukan kepada pelanggan, akan semakin besar jumlah investasi dalam piutang. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Semakin besar pembatasan yang diberlakukan, akan semakin besar jumlah piutang.

²⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalat*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), h.155.

3. Kebijakan dalam mengumpulkan piutang. Semakin ketat kebijakan dalam mengumpulkan piutang akan semakin kecil jumlah investasi dalam piutang.
4. Kebiasaan membayar dari para pelanggan. Apabila kebiasaan pelanggan dalam membayar utangnya sering terlambat, maka akan semakin besar jumlah investasi dalam piutang.²⁸

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Diduga tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari audit operasional terhadap kinerja piutang usaha.

Ha : Diduga terdapat pengaruh yang signifikan dari audit operasional terhadap kinerja piutang usaha.

²⁸Slamet. Sugiri, *Akuntansi Pengantar 2...*,h. 45.